

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 *Bonus Plan***

###### **2.1.1.1 Teori Agensi**

Teori agensi merupakan teori yang digunakan perusahaan dalam mendasari praktik bisnisnya. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan disebut juga sebagai teori kontraktual yang memandang suatu perusahaan sebagai suatu perikatan kontrak antara anggota-anggota perusahaan. mereka juga menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebagai suatu kontrak antara satu atau lebih pihak yang mempekerjakan pihak lain untuk melakukan suatu jasa untuk kepentingan mereka yang meliputi pendelegasian beberapa kekuasaan pengambilan keputusan kepada pihak lain tersebut.

Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Dalam suatu korporasi, pemegang saham merupakan prinsipal dan CEO adalah agen mereka. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub dan jam kerja yang fleksibel. Sementara prinsipal (yaitu pemegang saham), di pihak lain diasumsikan

hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 2005:269).

Perbedaan preferensi antara prinsipal dan agen dapat menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Manajer akan mengambil keputusan dan kebijakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sebelum memberikan manfaat kepada pemegang saham. Padahal hal itu tidak sesuai dengan tujuan utama manajer yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham yang akan diwujudkan melalui pemaksimalan harga saham biasa (Weston dan Brigham, 1990).

Konflik keagenan lainnya yang mungkin terjadi yaitu mengenai informasi asimetri (*assymetries information*). Informasi asimetri timbul karena kurang lengkapnya informasi yang diperoleh atau salah satu pihak tidak memiliki informasi yang diketahui pihak lainnya. Misalnya, manajer mungkin memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham karena manajer adalah pihak yang lebih sering berhadapan dengan kegiatan operasional di perusahaannya. Dengan demikian pemegang saham yang hanya memiliki sedikit informasi akan kesulitan dalam mengontrol perusahaan yang dijalankan oleh manajer (Deviyanti, 2012:15).

Terdapat dua (2) macam *assymetries information* menurut Qomariyah, *et al.* (2007), yaitu:

1. *Adverse Selection*

*Adverse selection* adalah jenis asimetri informasi di mana satu pihak atau lebih melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan pihak lain (*insider*) lainnya mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan

daripada pemegang saham. Para pemegang saham atau prinsipal mungkin tidak mengakses semua informasi yang disediakan agen sehingga tidak dapat mengawasi tindakan manajer apakah mereka sudah melakukan kewajiban sesuai dengan kontrak atau tidak. Kemungkinan lainnya adalah manajer dengan sengaja menyembunyikan atau memanipulasi informasi-informasi penting yang akan diberikan kepada prinsipal, sehingga prinsipal sulit untuk melakukan keputusan investasi.

## 2. *Moral Hazard*

*Moral hazard* adalah jenis asimetri informasi di mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi tersebut, sedangkan pihak lainnya tidak. Hal ini dapat mengakibatkan pemegang saham sebagai prinsipal tidak mengetahui tindakan manajer sebagai agen yang mungkin melakukan tindakan di luar kontrak kerja yang tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku atau tindakan manajer yang mungkin bekerja kurang optimal bagi tercapainya tujuan perusahaan.

### 2.1.1.2 *Pengertian Bonus Plan*

Menurut Ahmed Riahi, Belkaoui (2007:189) mengemukakan bahwa hipotesis *bonus plan* (rencana bonus) berpendapat bahwa manajer dengan rencana bonus kemungkinan menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laporan laba periode di periode berjalan. Dasar pemikirannya adalah bahwa tindakan seperti itu mungkin akan meningkatkan presentase nilai bonus jika tidak terdapat penyesuaian terhadap metode terpilih.

*Bonus Plan* adalah perusahaan merencanakan bonus berdasarkan *net income*, maka perusahaan tersebut akan memilih prosedur akuntansi yang menggeser pelaporan *earning* masa datang ke periode sekarang. Berdasarkan *plan bonus hypothesis*, manajer seringkali berperilaku seiring dengan bonus yang diberikan (Jayanti Sapari, 2016:23)

Menurut Ulfa Maria (2014:90) *bonus plan* dapat diartikan sebagai manajer yang mengharapkan kompensasi atau bonus yang tinggi melalui manajemen laba.

Menurut Reskino Vemiliyarni (2014:187) *Bonus Plan* dalam hipotesis ini menjelaskan tentang pelaporan bonus manajer perusahaan atas perhitungan dan pelaporan laba yang diperoleh oleh manajer. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa *bonus plan* berkaitan dengan perencanaan bonus perusahaan yang ditujukan untuk para manajer.

Landasan teori mengenai *bonus plan* ini adalah *bonus plan hypothesis* di dalam *Positive Accounting Theory* menurut Watts dan Zimmerman (1986) yang menyatakan bahwa:

“Dalam *ceteris paribus* para manajer dengan rencana bonus akan lebih memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan *earning* untuk periode mendatang ke periode sekarang”.

Dengan kata lain, dengan adanya hipotesis *bonus plan* ini, manajer (*agent*) cenderung menaikkan laba sehingga menaikkan bonus yang akan dia dapat.

Robbin, et al. (1993) dalam Utomo Rochmad B. (2014) mengemukakan bahwa perencanaan kompensasi manajemen dalam perusahaan biasanya didasarkan pada laba yang ditargetkan. Target umumnya dinyatakan dengan syarat laba bersih akuntansi. Manajer memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba atau memaksimalkan kompensasi yang didasarkan pada laba akuntansi, setelah

manajemen menyetujui kontrak kompensasi. berdasarkan kontrak kompensasi inilah oportunistik manajemen untuk mendapatkan bonus timbul.

Menurut Hery (2017:106) tujuan dari pendekatan teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Salah satu contoh dalam penggunaan teori akuntansi positif adalah hipotesa mengenai program pemberian bonus. Hipotesa ini menunjukkan bahwa manajemen yang remunerasinya didasarkan pada bonus, akan berusaha memaksimalkan bonusnya melalui penggunaan metode akuntansi yang dapat menaikkan laba dan pada akhirnya memperbesar bonus. Teori ini akan dapat menjelaskan atau memprediksi perilaku manajemen dalam hal program pemberian bonus (*bonus plan*).

Teori akuntansi positif menyatakan bahwa ada tiga hubungan keagenan (Ghozali & Chariri, 2007 dalam Ardilasari S. 2018:19) dan yang berkaitan dengan *bonus plan* yaitu hubungan antara manajemen dengan pemilik (pemegang saham), apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibanding dengan investor lain, maka manajer cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau kurang konservatif. Hal ini dikarenakan prinsipal (pemegang saham) menginginkan dividen berupa *capital gain* dari saham yang dimilikinya, sedangkan karena agen (manajer) ingin dinilai kinerjanya bagus dan mendapatkan bonus, maka manajer akan melaporkan laba yang lebih tinggi. Namun jika kepemilikan manajer lebih banyak dibanding para investor lain, maka manajemen cenderung melaporkan laba lebih konservatif. Karena rasa memiliki manajer terhadap perusahaan itu cukup besar, maka manajer lebih berkeinginan untuk memperbesar perusahaan. Dengan metode konservatif, maka akan terdapat cadangan tersembunyi yang cukup besar

untuk meningkatkan jumlah investasi perusahaan. Aset diakui dengan nilai terendah, ini berarti nilai pasar lebih besar dari pada nilai buku.

### 2.1.1.3 Pengukuran *Bonus Plan*

Pada penelitian ini penulis menggunakan struktur kepemilikan publik sebagai proksi dari *bonus plan*. Menurut Deviyanti (2012:44) kepemilikan publik merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki publik atas jumlah saham yang beredar di perusahaan. Menurut Deviyanti (2012:44), kepemilikan publik dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KP = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki publik}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Keputusan manajemen untuk melaporkan laba dengan nilai yang tinggi secara optimis didukung karena rendahnya pengendalian terhadap manajemen karena menyebarnya kepemilikan. Hal tersebut akan menimbulkan fleksibilitas yang dimiliki manajemen dalam menyajikan informasi laporan keuangan. Manajemen dapat saja menaikkan nilai laba atau melakukan *income maximation* untuk mencapai target laba yang diinginkan pemilik atau pemegang saham. Dengan begitu manajemen akan mendapatkan bonus atas kinerjanya yang terlihat baik (Savitri, Enni 2016:70-71).

### 2.1.1.4 Kepemilikan Publik

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer.

Menurut Sudana I Made (2011:11) mengemukakan bahwa :

“Struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal ke dalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak

yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik”.

Struktur kepemilikan terbagi ke dalam beberapa jenis. Adapun jenis-jenis struktur kepemilikan menurut Jensen dan Meckling (1976) dapat dibedakan menjadi tiga (3), yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik.

Menurut Wijayanti (2009:20) dalam Yunitasari D. (2014) menyatakan bahwa kepemilikan publik adalah proporsi jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

Menurut Febriantina Istiqomah D. (2010) kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar.

Struktur kepemilikan publik merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh publik dibandingkan dari seluruh saham yang beredar. Pengendalian akan cenderung rendah apabila kepemilikan publik menyebar. Hal ini dikarenakan pemilik saham dari suatu perusahaan menjadi banyak dengan masing-masing pemilik hanya memiliki jumlah saham yang sedikit. Perusahaan akan dapat melakukan manajemen laba dengan menaikkan labanya agar mendapat bonus karena kinerjanya dinilai bagus (asumsi *bonus plan*) (Deviyanti, 2012:29).

Menurut Savitri Enni (2016:70) jika kepemilikan saham yang dimiliki publik lebih banyak maka manajer lebih memilih melaporkan laba dengan nilai yang tinggi atau secara optimis. Karena pihak pemegang saham menginginkan pengembalian investasi, baik dividen maupun *capital gain*, mereka tinggi. Dengan

begitu kinerja manajer akan dinilai baik dan manajer mendapatkan bonus (*bonus plan hypothesis*).

## **2.1.2 Debt Covenant**

### **2.1.2.1 Pengertian Debt Covenant**

Menurut James C. Van Horne (2007:402) mengemukakan bahwa:

*Debt Covenant* adalah perjanjian pinjaman yang memberikan kepada pemberi pinjaman otoritas hukum untuk mengambil tindakan apabila peminjam melanggar ketentuan pinjaman tersebut.

*Debt Covenant* adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Chocran, 2001 dalam Fatmariansi 2013:6).

Hardinsyah (2013) dalam T.P. Susilo dan J.M. Aghni (2017) mengemukakan bahwa :

*Debt Covenant* (kontrak utang) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti pemberian dividen yang berlebihan atau memberikan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan.

*Debt covenant* adalah kontrak peminjam dan pemberi pinjaman untuk membayar kepada pemberi pinjaman sejumlah dollar dalam jumlah yang tetap secara periodik. Ketika perusahaan mempunyai keuntungan yang besar, pihak yang memberikan pinjaman menerima pembayaran kontrak dan tidak perlu mengetahui berapa keuntungan persis perusahaan (Craigbain et al, 2017)

Menurut A'Isya Risa Dewi (2019:242) *Debt covenant* merupakan perjanjian yang muncul dari adanya kontrak perjanjian yang bertujuan untuk menjaga posisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang agar tetap dalam koridor yang memungkinkan untuk dapat melunasi kewajibannya.



Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *debt covenant* berkaitan dengan kesepakatan utang. Sebagian kesepakatan utang berisi perjanjian (*covenant*) yang mengharuskan peminjam memenuhi syarat yang disepakati dalam perjanjian hutang (Scott, 2000 dalam Nugroho D.A 2012). Watts dan Zimmerman (1986) mendefinisikan perjanjian seperti pembatasan dividen dan pembatasan pembelian kembali saham, pembatasan modal kerja, pembatasan merger, pembatasan akuisisi, pembatasan investasi, pembatasan pelepasan aset, pembatasan pembiayaan masa depan merupakan bentuk *debt covenant*.

Landasan teori mengenai *debt covenant* ini adalah *debt covenant hypothesis* di dalam teori akuntansi positif menurut Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa:

“Dalam *ceteris paribus* manajer perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan *earning* untuk periode mendatang ke periode sekarang”.

Teori akuntansi positif menyatakan bahwa ada tiga hubungan keagenan (Ghozali & Chariri, 2007 dalam Ardilasari S. 2018) dan yang berkaitan dengan *debt covenant* yaitu hubungan antara manajemen dengan kreditur, manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena pada umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi hutang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo. Dengan kata lain kreditur beranggapan akan mengurangi tingkat risiko utang tidak dibayar. Kreditur dengan melihat laba yang tinggi cenderung mudah dalam memberikan pinjaman.

#### **2.1.2.2 Pengukuran *Debt Covenant***

Untuk mengidentifikasi *debt covenant* penulis menggunakan proksi dari tingkat *leverage* dengan pendekatan *Debt to Asset Ratio*. Hal ini sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Sulastiningsih & Husna (2017:115). *Debt to Asset Ratio* (DAR), yaitu suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang (*total debt*) dengan total aktiva. Menurut Hery (2018:166) berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio *leverage*:

$$\text{Rasio } \textit{Leverage} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Ahmed Riahi, Belkaoui (2007:189) mengemukakan bahwa semakin tinggi utang/ekuitas perusahaan, yaitu sama dengan semakin dekatnya (“semakin ketatnya”) perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat di dalam perjanjian utang dan semakin besar kesempatan terhadap pelanggaran perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar kemungkinan bahwa para manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan laba.

Dengan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan pengakuan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang maka perusahaan akan mempunyai *leverage ratio* yang kecil, sehingga menurunkan kemungkinan *default technic*. Seperti diketahui bahwa banyak perjanjian hutang mensyaratkan peminjam untuk mematuhi atau mempertahankan rasio utang terhadap modal, modal kerja, ekuitas pemegang saham dll. selama masa perjanjian, jika perjanjian tersebut dilanggar perjanjian hutang mungkin memberikan penalti, seperti kendala dalam dividen atau pinjaman tambahan (Januarti, Indira 2004).

### **2.1.2.3 Ketentuan *Debt Covenant***

*Leverage* menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang dan merupakan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Jika perusahaan telah diberi pinjaman oleh kreditor, maka kreditor secara otomatis

mempunyai kepentingan terhadap keamanan dana yang ia pinjamkan, yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan. Untuk melindungi dirinya dari tindakan manajemen yang mungkin kurang menguntungkan kreditor, mereka dapat melakukan berbagai cara seperti (Weston dan Brigham, 1990 dalam Deviyanti 2012:31):

1. Melalui persyaratan yang diajukan dalam perjanjian kredit. Kreditor dapat mensyaratkan untuk menerapkan pelaporan keuangan yang konservatif.
2. Jika kreditor berpendapat bahwa perusahaan mencoba mengambil keuntungan dari mereka dengan cara yang tidak etis, maka mereka akan menghentikan pemberian kredit selanjutnya atau pemberian kredit dilakukan dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi daripada yang normal.

Lo (2006) dalam Deviyanti (2012:35) menyatakan jika perusahaan mempunyai hutang yang tinggi, maka kreditor juga mempunyai hak untuk mengetahui dan mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian, asimetri informasi antara kreditor dan perusahaan berkurang karena manajer tidak dapat menyembunyikan informasi keuangan yang mungkin akan dimanipulasi atau melebih-lebihkan aset yang dimiliki. Oleh karena itu, kreditor akan meminta manajer untuk melakukan pelaporan akuntansi secara konservatif agar perusahaan tidak berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya. Lebih lanjut lagi, semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin besar kemungkinan konflik yang akan muncul antara pemegang saham dan pemegang obligasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi yang konservatis (Ahmed dan Duellman, 2006 dalam Deviyanti, 2012:35).

#### 2.1.2.4 Rasio *Leverage*

Rasio *leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang (Fahmi Irham, 2015:127).

Menurut Menurut Sartono Agus (2010:120) *Leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Sedangkan menurut Sudana (2009:23) *Leverage* merupakan besarnya penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan perusahaan.

Menurut Harjito A. dan Martono (2011:315) mengemukakan bahwa *leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan aset dan sumber dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban.

Penggunaan rasio-rasio *leverage* disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio *leverage* secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio *leverage* yang ada. Berikut adalah jenis-jenis rasio *leverage* yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya (Hery, 2018:166):

1. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan aset. Dengan kata lain, rasio ini

digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Apabila besaran rasio utang terhadap aset adalah tinggi maka hal ini tentu saja akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditor karena dikhawatirkan bahwa perusahaan tidak mampu melunasi utang-utangnya dengan total aset yang di milikinya. Rasio yang kecil menunjukkan bahwa sedikitnya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang (dengan kata lain bahwa sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh modal).

Menurut Hery (2018:166) berikut adalah rumus yang di gunakan untuk menghitung rasio utang:

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

## 2. Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitor.

Menurut Hery (2018:169) semakin tinggi *debt to equity ratio* maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Ketentuan umumnya adalah bahwa debitor seharusnya memiliki *debt to equity ratio* kurang dari 0,5 namun perlu diingat juga bahwa ketentuan ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing jenis industri.

Menurut Hery (2018:169) berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap modal:

$$\text{Rasio utang terhadap modal} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

### 3. Rasio Utang jangka Panjang terhadap Modal (*Long Term Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara utang jangka panjang dengan modal. Menurut Hery (2018:170) rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang jangka panjang terhadap modal:

$$\text{Rasio utang jangka panjang terhadap modal} = \frac{\text{Utang jangka panjang}}{\text{Total Modal}}$$

#### 4. Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (*Time Interest Earned Ratio*)

Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan dihitung sebagai hasil bagi antara laba sebelum bunga dan pajak dengan besarnya beban bunga yang harus dibayarkan.

Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan sering juga dikenal sebagai *coverage ratio*. Ratio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga. Apabila perusahaan tidak mampu untuk untuk membayar bunga, dalam jangka panjang hal ini tentu saja dapat menghilangkan kepercayaan kreditor terhadap tingkat kredibilitas perusahaan bersangkutan. Bahkan, ketidakmampuan perusahaan dalam membayar beban bunga ini dapat berakibat timbulnya tuntutan hukum dari kreditor. Lebih dari itu, kemungkinan perusahaan menuju kearah proses pailit (kebangkrutan) juga semakin besar.

Menurut Hery (2018:171) semakin tinggi *times interest earned ratio* maka berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, dan hal ini juga tentu saja akan menjadi ukuran bagi perusahaan untuk dapat memperoleh tambahan pinjaman yang baru dari kreditor. Sebaliknya apabila rasionya rendah maka berarti semakin pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman.

Menurut Hery (2018:171) rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kelipatan bunga yang dihasilkan:

$$\text{Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Beban bunga}}$$

#### 5. Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban (*Operating Income to Liabilities Ratio*)

Rasio laba operasional terhadap kewajiban merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban.

Menurut Hery (2018:170) semakin tinggi rasio laba operasional terhadap kewajiban maka berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban, dan hal ini juga tentu saja akan menjadi ukuran bagi perusahaan untuk dapat memperoleh tambahan pinjaman yang baru dari kreditor. Sebaliknya apabila rasionya rendah maka berarti semakin kecil pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban.

Menurut Hery (2018:173) rumus yang digunakan untuk menghitung rasio laba operasional terhadap kewajiban:

$$\text{Rasio laba operasional terhadap kewajiban dihasilkan} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Beban bunga}}$$

#### 2.1.2.5 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Penggunaan rasio *leverage* yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2013:153), diantaranya:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).



3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sementara itu, manfaat dari rasio *leverage* ini menurut Kasmir (2013:154)

adalah:

1. Untuk menganalisis posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

### 2.1.3 *Political Cost*

#### 2.1.3.1 Pengertian *Political Cost*

Biaya politis (*political cost*) adalah biaya yang timbul dari konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah selaku wakil masyarakat yang berwenang untuk melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan perpajakan maupun peraturan-peraturan lainnya. Proses pengalihan kekayaan biasanya akan didasari dari informasi akuntansi dari perusahaan terkait. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka akan semakin besar pula *political cost* yang harus dikeluarkan (Savitri Enni, 2016:90).

Menurut Jayanti dan Sapari (2016) *Political Cost* adalah biaya politik perusahaan yang timbul dari adanya konflik kepentingan antara manajer dengan pemerintah, masyarakat, media yang menyoroiti perusahaan.

*Political Cost* adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk semua tindakan-tindakan politis seperti pajak, regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, upah buruh dan lain-lain (Sarwinda dan Afriyenti, 2015).

Berdasarkan ketiga definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *political cost* berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan sebagai dampak dari konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah.

Landasan teori mengenai *political cost* ini adalah *political cost hypothesis* di dalam teori akuntansi positif menurut Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa:

“Dalam *ceteris paribus* semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laporan *earning* periode sekarang ke periode mendatang”

Menurut Ahmed Riahi, Belkaoui (2007:189) mengemukakan bahwa hipotesis biaya politis berpendapat bahwa perusahaan besar dan bukannya perusahaan kecil kemungkinan besar akan memilih akuntansi untuk menurunkan laporan laba

Motivasi perusahaan melakukan ini misalnya untuk menghindari tekanan politik seperti tuduhan monopoli dengan menunjukkan laba perusahaan yang tidak berlebihan, menghindari tuntutan serikat kerja dengan menunjukkan bahwa laba perusahaan menurun, dan lain sebagainya (Jayanti dan Sapari, 2016). Hipotesis ini berdasarkan asumsi bahwa perusahaan yang biaya politiknya besar lebih sensitif dalam hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang biaya politiknya kecil, dengan kata lain perusahaan besar cenderung lebih suka menurunkan laba atau mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan perusahaan kecil (Januarti, Indira 2004).

Teori akuntansi positif menyatakan bahwa ada tiga hubungan keagenan (Ghozali & Chariri, 2007 dalam Ardilasari S. 2018:19) dan yang berkaitan dengan *political cost* yaitu hubungan antara manajemen dengan pemerintah, manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak berkepentingan lainnya. Pada umumnya perusahaan yang besar dibebani oleh beberapa konsekuensi. Misalnya harus menyediakan pelayanan publik lebih baik dan harus membayar pajak yang lebih tinggi.

### **2.1.3.2 Pengukuran *Political Cost***

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) biaya politik mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan

tindakan-tindakan politis seperti pajak, regulasi, subsidi pemerintah, tarif, *anti trust*, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

*Political cost* dapat diukur dengan menggunakan empat (4) indikator yaitu (Watts dan Zimmerman, 1986).:

1. Ukuran Perusahaan (*size*)

Ukuran perusahaan (*size*) adalah tingkat besarnya perusahaan yang direfleksikan dari jumlah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan akan mengakibatkan biaya politis yang besar juga seperti misalnya penetapan pajak yang tinggi oleh pemerintah.

2. Risiko Perusahaan (*risk*)

Zmijewski dan Hagerman (1981) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki risiko lebih tinggi biasanya akan mendapatkan pengembalian laba yang tinggi juga sebagai kompensasi dari besarnya risiko sistematis yang harus mereka hadapi. Salah satu dari risiko sistematis yang harus dihadapi oleh perusahaan adalah *volatility risk*, yang merupakan risiko naik turun harga dari portofolio saham. Biaya politik bervariasi terhadap risiko perusahaan dan perusahaan yang berisiko tinggi lebih besar kemungkinannya untuk memilih portofolio prosedur yang menurunkan laba atau laporan keuangan cenderung konservatif.

3. Intensitas Modal (*capital intensity*)

Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan (Waluyo dan Kearo, 2002 dalam Priambodo *et al.* 2015). Rasio ini diukur dengan total asset tetap dibagi pendapatan bersih perusahaan. Semakin besar rasio intensitas modal maka

semakin tinggi modal aset yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan. Zmijewski dan Hagerman (1981) membuat hipotesis bahwa semakin padat modal sebuah perusahaan, maka biaya politis yang akan muncul semakin besar pula.

#### 4. Rasio Konsentrasi

Rasio konsentrasi didefinisikan sebagai persentasi penjualan perusahaan dalam suatu industri serta dapat memberikan gambaran tentang peran perusahaan yang ada dalam industri (Sungkar, 2012). Berdasarkan *size hypothesis* Watts dan Zimmerman (1986), perusahaan dengan rasio konsentrasi yang tinggi juga akan memiliki biaya politis yang tinggi.

Pada penelitian ini penulis menggunakan ukuran perusahaan sebagai proksi dari *political cost*. Hal ini didasarkan pada penelitian Sugiarto N. (2017) yang mana menggunakan *size* (ukuran) perusahaan sebagai proksi *political cost* yang mana ukuran perusahaan diukur dengan rumus berikut :

$$SIZE = Net Sales$$

Belkaoui dan Karpik (1989) menyebutkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar *political cost*-nya. Oleh karena itu Watts dan Zimmerman (1990) mengungkapkan hipotesis bahwa *political cost* memprediksikan bahwa manajer ingin mengecilkan laba untuk mengurangi *political cost* yang potensial.

#### 2.1.3.3 Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto B. (2008:313) pengertian ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Besarnya kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva”.

Franz Traxler dan Gerhard Huemer (2007:358) mengemukakan ukuran perusahaan sebagai berikut:

*“Firm size is the criterion most frequently use for demarcating membership domains, something which underscores the relevance of this criterion as a divide in business interest”*

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito dan Herawaty, 2005).

Menurut Machfoedz (1994) dalam Wijiantoro (2017) Kategori ukuran perusahaan yaitu:

1. Perusahaan Besar (*large firm*)

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.

2. Perusahaan Menengah (*medium size*)

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar.

### 3. Perusahaan Kecil (*small size*)

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.

#### **2.1.3.4 Penentuan Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualan (Seftianne, 2011).

Menurut Setiyadi (2007) dalam Wijiantoro (2017) Ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah:

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
3. Total utang, merupakan jumlah utang perusahaan pada periode tertentu.
4. Total asset, merupakan keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu.

Perusahaan besar juga dihadapkan dengan besarnya biaya politis yang tinggi, sehingga perusahaan besar cenderung menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif untuk mengurangi besarnya biaya politis. Biaya politis mencakup semua biaya atau transfer kekayaan yang harus ditanggung perusahaan terkait tindakan-tindakan *antitrust*, regulasi, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh, dan sebagainya. Pemerintah sebagai pembuat regulasi serta penentu kebijakan suatu

negara dimana perusahaan beroperasi akan lebih mengawasi perusahaan besar. Hal tersebut menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula biaya politis yang harus dibayarkan, sehingga untuk mengurangi biaya tersebut perusahaan berupaya melaporkan labanya secara konservatif agar laba tidak terlihat terlalu tinggi (Ardina & Januarti, 2012 dalam Ardilasari S. 2018:20).

#### **2.1.4 *Accounting Conservatism***

##### **2.1.4.1 *Pengertian Accounting Conservatism***

Watts (2003) mendefinisikan konservatisme sebagai berikut:

“Konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan terjadi”.

Givoly dan Hayn (2000) mendefinisikan konservatisme sebagai pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan.

Definisi resmi dari konservatisme terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB (*Financial Accounting Statement Board*) dalam Savitri Enni (2016:23) sebagai berikut:

“Konservatisme adalah reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan”.

Menurut Ahmed Riahi, Belkaoui (2007:288) prinsip konservatisme (*conservatism principle*) adalah suatu prinsip pengecualian atau modifikasi dalam hal bahwa prinsip tersebut bertindak sebagai batasan terhadap penyajian data akuntansi yang relevan dan andal. Prinsip konservatisme menganggap bahwa ketika memilih antara dua (2) atau lebih teknik akuntansi yang berlaku umum, suatu



preferensi ditunjukkan untuk opsi yang memiliki dampak paling tidak menguntungkan terhadap ekuitas pemegang saham. Secara spesifik, prinsip tersebut mengimplikasikan bahwa nilai terendah dari aktiva dan pendapatan serta nilai tertinggi dari kewajiban dan beban yang sebaiknya dipilih untuk dilaporkan.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa konservatisme akuntansi berkaitan dengan mempercepat pengakuan biaya dan rugi serta memperlambat pengakuan pendapatan atau keuntungan.

#### **2.1.4.2 *Accounting Conservatism* dalam PSAK**

PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di dalam sebuah kondisi yang sama. Hal tersebut mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Beberapa pilihan metode pencatatan di PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif diantaranya adalah (Savitri Enni, 2016:2):

1. *PSAK No. 14* tentang persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode yaitu FIFO (*first in first out*) atau masuk pertama keluar pertama dan metode rata-rata tertimbang.
2. *PSAK No. 16* tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap. Estimasi suatu aktiva didasarkan pada pertimbangan manajemen yang berasal dari pengalaman perusahaan saat menggunakan aktiva yang serupa. Estimasi masa manfaat tersebut

haruslah diteliti kembali secara periodik dan jika manajemen menemukan bahwa masa manfaat suatu aktiva berbeda dari estimasi sebelumnya maka harus dilakukan penyesuaian atas beban penyusutan saat ini dan di masa yang akan datang. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah masa manfaat aktiva yang digunakan dan dapat mendorong timbulnya laba yang konservatif

3. *PSAK No. 19* tentang aset tidak berwujud yang berkaitan dengan metode amortisasi. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya.
4. *PSAK No. 20* tentang biaya riset dan pengembangan yang menyebutkan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan. Apabila besar kemungkinan biaya tersebut akan meningkatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan biaya tersebut dapat diukur secara handal, maka biaya-biaya tersebut memenuhi syarat untuk diakui sebagai aktiva.

#### **2.1.4.3 Accounting Conservatism dalam IFRS**

Konservatisme akuntansi tidak menjadi prinsip yang diatur dalam standar akuntansi Internasional (IFRS). Hellman (2007) menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan akuntansi konvensional, IFRS (*International Financial Reporting Standards*) berfokus pada pencatatan yang semakin relevan sehingga menyebabkan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap estimasi dan berbagai *judgement*. Dalam hal ini, kebijakan yang ditetapkan IASB (*International*

*Accounting Standard Board*) tersebut menyebabkan semakin berkurangnya penekanan atas penerapan akuntansi konservatif secara konsisten dalam pelaporan keuangan berdasarkan IFRS.

Khairina (2009) menyebutkan ada beberapa poin dalam IFRS mengenai semakin berkurangnya penekanan atas penggunaan akuntansi konservatif dalam IAS (*International Accounting Standard*) antara lain (Savitri Enni, 2016:27):

1. *IAS 11 (Zero Profit Recognition for Fixed-Price Contracts)*, yang versi terbaru dari IAS mulai berlaku sejak tahun 1995. Standar ini mengatur mengenai penggunaan POC (*Percentage of Completion*) untuk pengakuan pendapatan dan biaya dalam kontrak konstruksi sebagai pengganti dari metode CC (*Complete Contract*). Hellman (2007) mensyaratkan bahwa metode CC dinilai lebih konservatif dibandingkan metode POC karena dalam metode CC nilai keuntungan yang dapat diakui perusahaan akan mengalami *understatement* selama proses kontrak dan akan mengalami *overstatement* setelah kontrak selesai. Hal ini disebabkan perusahaan hanya boleh mengakui pendapatan dari kontrak konstruksi tersebut setelah proses konstruksi selesai. Sementara dalam metode POC perusahaan dapat mengakui pendapatan berdasarkan estimasi persentase penyelesaian kontrak pada tanggal neraca.
2. *IAS 12 (Deferred Tax Asset)*, mengatur mengenai pengakuan *deferred tax asset* pada neraca jika mungkin (*probable*) terdapat *future taxable profit*. Sebelum dikeluarkannya IAS 12 tersebut *deferred tax asset* tidak diakui di dalam neraca karena terdapat ketidakjelasan atas perolehan *taxable profit* di masa yang akan datang. Pemberlakuan efektif IAS 12 tersebut

mempresentasikan perlakuan akuntansi yang kurang konservatif (Hellman, 2007).

3. *IAS 16 (Property, Plant, and Equipment)*, mengatur bahwa dalam pengukuran nilai aktiva tetap, perusahaan dapat memilih penggunaan metode biaya atau revaluasi. Metode biaya menggunakan metode yang telah lama digunakan dalam akuntansi konvensional, sementara metode revaluasi yang mensyaratkan perusahaan untuk memperbaiki aktiva secara periodik atas nilai pasarnya dinyatakan sebagai metode kurang konservatif. Dalam metode akuntansi ini, perusahaan dapat mengakui peningkatan nilai aktiva sebagai penambahan atas modal atau peningkatan nilai pendapatan jika penurunan nilai pada periode sebelumnya telah diakui sebagai biaya.
4. *IAS 38 (Capitalism of Development Cost)*, pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998, kemudian diikuti dengan revisinya yang berlaku sejak 31 Maret 2004. Berdasarkan IAS 38 aktiva tidak berwujud yang berasal dari aktivitas pengembangan diakui sebagai aktiva jika telah memenuhi beberapa syarat tertentu sebelum diberlakukannya standar ini, pembebanan langsung menjadi acuan utama dalam perlakuan akuntansi yang kurang konservatif.

#### **2.1.4.4 Pengukuran *Accounting Conservatism***

Watts (2003) dalam Savitri Enni (2016:45) membagi konservatisme menjadi tiga (3) pengukuran, yaitu *Earning/Stock Return Relation Measure*, *Earning/Accrual Measure*, *Net Asset Measure*. Berbagai peneliti telah mengajukan berbagai metode pengukuran konservatisme. Berikut beberapa pengukuran konservatisme jika dikelompokkan sesuai dengan pendekatan Watts (2003):

### **1. *Earning/Stock Return Relation Measure***

*Stock market price* berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai aset pada saat terjadinya perubahan, baik perubahan atas rugi ataupun laba tetap dilaporkan sesuai dengan waktunya. Basu (1997) menyatakan bahwa konservatisme menyebabkan kejadian-kejadian yang merupakan kabar buruk atau kabar baik terefleksi dalam laba yang tidak sama (asimetri waktu pengakuan). Hal ini disebabkan karena kejadian yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan harus segera diakui sehingga mengakibatkan *bad news* lebih cepat terefleksi dalam laba dibandingkan *good news*.

### **2. *Earning/Accrual Measure***

#### 1) *Model Givoly dan Hayn (2000)*

Dwiputro (2009) dalam tulisannya menjelaskan bahwa Givoly dan Hayn memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Depresiasi dikeluarkan dari *net income* dalam perhitungan CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas investasi dan bukan kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang ada dalam *net income* tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan.

## 2) *Model Zhang (2007)*

Zhang (2007) menggunakan *conv\_accrual* sebagai salah satu pengukuran konservatisme. *Conv\_accrual* didapatkan dengan membagi akrual non operasi dengan total aset. Akrual non operasi memperlihatkan pencatatan kejadian buruk yang terjadi dalam perusahaan, contohnya biaya restrukturisasi dan penghapusan aset. Dalam penelitiannya Zhang (2007) mengalikannya *conv\_accrual* dengan -1 bertujuan untuk mempermudah analisa. Dimana semakin tinggi nilai *conv\_accrual* menunjukkan penerapan konservatisme yang semakin tinggi juga.

## 3) *Discretionary Accrual*

Model akrual lainnya yang juga dapat digunakan sebagai pengukuran konservatisme adalah model *discretionary accrual* (Winata, 2008 dalam Dachy, 2010). Terdapat beberapa model untuk menghitung *discretionary accrual*. *Discretionary Accrual* yang paling sering digunakan adalah *Discretionary Accrual model Kasznik (1999)*. Kasznik (1999) memodifikasi model Dechow *et al.* (1995) dengan memasukkan unsur selisih arus kas operasional ( $\Delta\text{CFO}$ ) untuk mendapatkan nilai akrual non-diskresioner dan akrual diskresioner. Karena Kasznik (1999) berpendapat bahwa perubahan arus kas dari hasil operasi akan berkorelasi negatif dengan total akrual.

## 3. *Net Asset Measure*

Ukuran ketiga yang digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme dalam laporan keuangan adalah nilai aktiva yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement*. Salah satu model pengukurannya adalah proksi pengukuran yang

digunakan oleh Beaver dan Rayn (2000) yaitu dengan menggunakan *market to book ratio* yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1 mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pengukuran konservatisme akuntansi yang diadaptasi dari Givoly dan Hayn (2002). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$C_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

$C_{it}$  : Konservatisme Akuntansi

$NI_{it}$  : *Net income* sebelum *extraordinary item* ditambah depresiasi dan amortisasi

$CFO_{it}$  : *Cash Flow* dari kegiatan operasional

Hasil pengukuran konservatisme akuntansi diberi istilah dengan tingkat konservatisme akuntansi dan akan bernilai negatif jika perusahaan menerapkan prinsip konservatisme. Agar tingkat konservatisme akuntansi perusahaan mencerminkan nilai makin tinggi makin konservatif, maka hasil perhitungan tingkat konservatisme dikalikan dengan minus (-1) (Noviantari *et al.*, 2015). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai  $C_{it}$  maka semakin konservatif perusahaan tersebut.

#### **2.1.4.5 Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi *Accounting Conservatism***

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi menurut (Savitri Enni, 2016:67):

#### 1. Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah dewan komisaris adalah jumlah yang tepat dari anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Menurut pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

#### 2. Jumlah Komite Audit

Komite audit berfungsi membantu dewan komisaris dalam memastikan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi tugas-tugas untuk mengkaji perencanaan audit baik oleh pihak internal dan eksternal, menelaah penerapan tata kelola perusahaan, etika bisnis serta pedoman perilaku.

#### 3. Proporsi Komisaris Independen

Salah satu fungsi utama dari komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi monitoringnya.

#### 4. *Cash Flow*

Laporan arus kas dapat menyediakan informasi tentang pertumbuhan perusahaan. Semakin besar peluang investasi bagi perusahaan ditunjukkan dari kemampuan perusahaan untuk menyediakan dana baik secara internal maupun eksternal maka semakin besarnya investasi yang dilakukan.



Semakin persisten dan lancar arus kas dari pendapatan investasi, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan *growth*.

#### 5. Profitabilitas

Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi akan membuka lini atau cabang yang baru serta memperbesar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya. Tingkat keuntungan yang tinggi menandakan pertumbuhan perusahaan pada masa mendatang.

#### 6. *Investment Opportunity Set (IOS)*

*Investment Opportunity Set (IOS)* merupakan faktor umum yang mempengaruhi hubungan antara kepemilikan manajerial dan *asymmetric timeliness* dari laba sebagai proksi dari konservatisme.

#### 7. *Company Growth*

Pertumbuhan perusahaan (*Company Growth*) merupakan suatu harapan penting yang diinginkan oleh pihak internal perusahaan yaitu manajemen maupun eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Pertumbuhan diharapkan dapat memberikan aspek positif bagi perusahaan.

#### 8. Intensitas Modal

Intensitas modal merupakan salah satu indikator dari *political cost hypothesis*, karena semakin banyak aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan penjualan atas produk perusahaan maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut besar.

### 9. *Non-CEO Family Ownership*

*Family Ownership* akan mendorong pemiliknya untuk menuntut laporan keuangan yang konservatif, karena pengeluaran pemilik semakin besar pada biaya agensi dan biaya litigasi.

### 10. Risiko Litigasi

Risiko litigasi diartikan sebagai risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut meliputi kreditor, investor, dan regulator.

### 11. Tingkat Kesulitan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya ingin melihat prospek dan risiko perusahaan. prospek bisa dilihat dari keuntungan (profitabilitas) dan risiko bisa dilihat dari tingkat kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

### 12. Manajemen Laba

*Earning management* merupakan cara menyajikan laba yang disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan oleh manajer dan dilakukan melalui pemilihan kebijakan akuntansi atau melalui pengelolaan akrual.

## 2.2 **Kerangka Pemikiran**

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan dibagi menjadi dua (2), yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan

masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, 2014:4)

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan (Hery, 2014:4). Salah satu dari prinsip akuntansi adalah prinsip konservatisme. Laporan keuangan yang menerapkan prinsip konservatisme tentu tidak akan menyajikan laporan keuangan yang terlalu optimistik dikarenakan perusahaan juga mempertimbangkan ketidakpastian dan risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan.

*Accounting conservatism* atau konservatisme akuntansi adalah prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka biaya dan hutang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti ini terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*) (Juanda dalam Savitri Enni, 2016:23). Yang menjadi indikator dari konservatisme akuntansi adalah laba bersih sebelum *extraordinary items* ditambah depresiasi dan amortisasi dan arus kas operasi. Sebagaimana di kemukakan oleh Givoly dan Hayn (2000) bahwa penggunaan akuntansi yang konservatif akan menghasilkan akrual negatif yang terus-menerus, yang mana akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Depresiasi dikeluarkan dari *net income* dalam perhitungan karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva

yang dimiliki perusahaan. Sehingga semakin besar akrual negatif maka semakin konservatif pelaporan keuangan.

Penelitian kali ini menggunakan tiga (3) faktor yang diduga dapat mempengaruhi *accounting conservatism* yaitu *bonus plan*, *debt covenant*, dan *political cost*. *Bonus plan* berkaitan dengan rencana bonus yang ditetapkan perusahaan, *debt covenant* berkaitan dengan perjanjian atau kontrak hutang antara perusahaan dengan kreditur, dan *political cost* berkaitan dengan biaya politis yang timbul akibat konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah.

*Bonus Plan* adalah rencana bonus yang diselenggarakan oleh perusahaan bagi para manajer. *Bonus plan* ini menggambarkan hubungan keagenan antara manajer dengan pemilik, yang mana manajer akan senantiasa meningkatkan kinerjanya agar memperoleh bonus yang besar. Sehingga manajer akan termotivasi untuk memaksimalkan laba. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur *bonus plan* adalah menggunakan proksi kepemilikan publik yaitu jumlah saham yang dimiliki publik dan jumlah saham yang beredar. Penggunaan indikator tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Deviyanti (2012). Semakin menyebarnya kepemilikan perusahaan maka pengendalian terhadap perusahaan akan semakin rendah, oleh karena itu para manajer akan lebih leluasa di dalam melakukan praktik akuntansi yang dapat menguntungkan kepentingan pribadi dengan cara memaksimalkan laba sehingga para manajer akan memperoleh bonus yang diharapkan.

*Debt Covenant* adalah perjanjian kontrak hutang yang menggambarkan hubungan keagenan antara manajemen dengan kreditur dalam hal ini pihak eksternal perusahaan. Segala ketentuan terkait perjanjian kontrak hutang terangkum

di dalam *debt covenant*. Oleh karena itu *debt covenant* tersebut ada untuk melindungi kepentingan para pemberi pinjaman dari tindakan para peminjam yang dapat merugikan mereka. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur *debt covenant* adalah menggunakan proksi tingkat *leverage* dengan pendekatan *Debt to Asset Ratio* yaitu total hutang dan total aset dalam perusahaan. Penggunaan indikator tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmariansi (2013) Semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka potensi risiko terhadap kegagalan bayarnya pun akan semakin tinggi, yang mana hal tersebut dapat merugikan para pemberi pinjaman (kreditor). Oleh karena itu, manajemen akan termotivasi untuk memaksimalkan laba dengan tujuan agar perusahaan tetap dipercaya oleh kreditor atau pemberi pinjaman.

*Political Cost* adalah biaya politis yang timbul dari konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah selaku wakil dari masyarakat yang berwenang untuk melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan perpajakan maupun peraturan-peraturan lainnya (Savitri Enni, 2016:90). Proses pengalihan kekayaan biasanya akan didasari dari informasi akuntansi dari perusahaan terkait. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur *political cost* adalah menggunakan ukuran perusahaan yaitu dengan pendekatan nilai penjualan bersih. Penggunaan indikator tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto N. (2017). Belkaoui dan Karpik (1989) menyebutkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar *political cost*-nya.

Hubungan *bonus plan* dengan proksi kepemilikan publik terhadap *accounting conservatism* adalah negatif. Semakin banyak kepemilikan saham oleh

publik maka semakin tidak konservatif nya laporan keuangan, karena hal ini dipengaruhi oleh tindakan manajer yang ingin terlihat baik kinerjanya dengan menampilkan laba yang tinggi sehingga ia akan mendapatkan bonus yang diinginkan. Pernyataan tersebut sejalan dengan *bonus plan hypothesis* dalam teori akuntansi positif menurut Watts dan Zimmerman (1986) yang menyatakan bahwa “dalam *ceteris paribus* para manajer dengan rencana bonus akan lebih memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan *earning* untuk periode mendatang ke periode sekarang”. Tindakan tersebut juga dilatar belakangi oleh semakin menyebarnya kepemilikan perusahaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Deviyanti (2012) yang dalam penelitiannya menemukan ada hubungan negatif antara variabel independen *bonus plan* dengan *accounting conservatism*.

Hubungan *debt covenant* dengan proksi *leverage* terhadap *accounting conservatism* adalah negatif. Ketika suatu perusahaan mulai mendekati terjadinya pelanggaran perjanjian hutang, maka manajer akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian hutang dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Dengan adanya pelanggaran terhadap perjanjian hutang tersebut mengakibatkan timbulnya suatu biaya yang dapat menghambat kerja manajemen, sehingga manajemen berusaha untuk mencegah atau menunda hal tersebut dengan meningkatkan laba (Savitri Enni, 2016:92). Semakin tinggi jumlah utang yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan menggunakan prosedur yang meningkatkan laba yang dilaporkan, sehingga pelaporan keuangan menjadi kurang konservatif. Pernyataan tersebut sejalan dengan *debt covenant hypothesis* dalam teori akuntansi positif menurut Watts dan

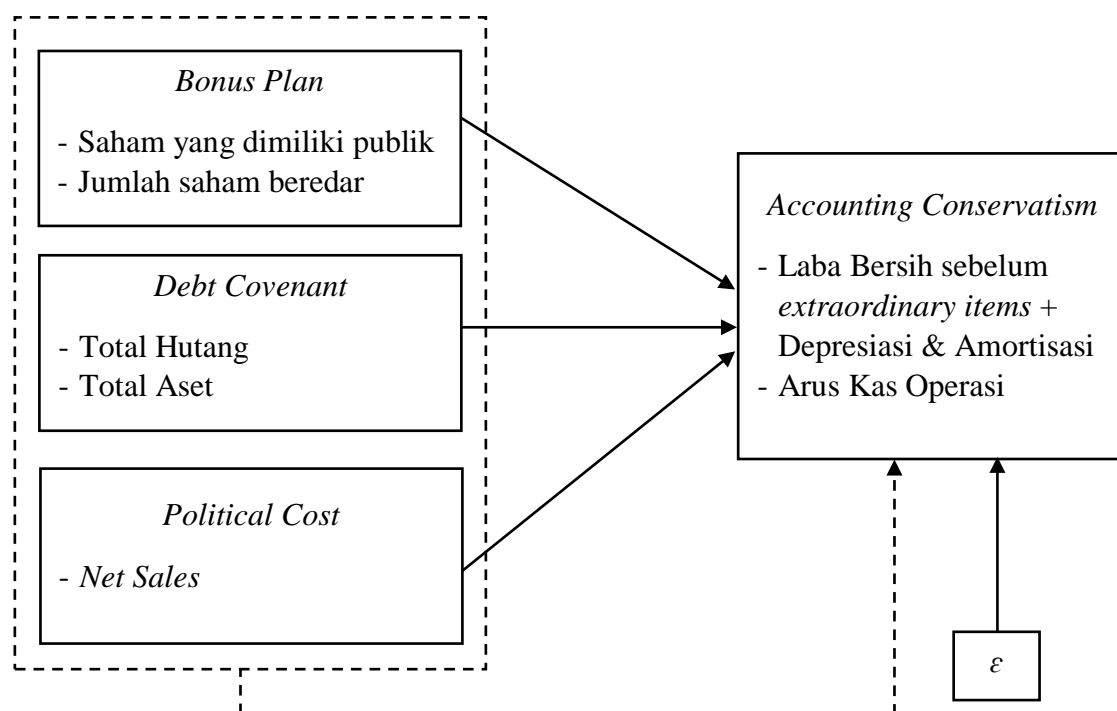
Zimmerman (1986) yang menyatakan bahwa “dalam *ceteris paribus* manajer perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan *earning* untuk periode mendatang ke periode sekarang”. Hal ini juga didukung oleh penelitian Nuraeni C. Dan Annafi Indra Tama (2019) yang dalam penelitiannya menemukan hubungan negatif antara variabel independen *debt covenant* dengan *accounting conservatism*.

Hubungan *political cost* dengan proksi ukuran perusahaan terhadap *accounting conservatism* adalah positif. Semakin besar ukuran suatu perusahaan akan semakin tinggi biaya politisnya, oleh karena itu manajemen akan berusaha untuk melaporkan laba yang konservatif untuk mengurangi biaya politisnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan *political cost hypothesis* dalam teori akuntansi positif menurut Watts dan Zimmerman (1986) yang menyatakan bahwa “dalam *ceteris paribus* semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laporan *earning* periode sekarang ke periode mendatang”. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ningsih Azmi R. *et al.* (2019) menemukan ada hubungan positif antara variabel independen *political cost* dengan *accounting conservatism*.

Konservatisme akuntansi dilakukan bukanlah tanpa alasan. Hendrikson (1982) dalam Savitri Enni (2016:38) mengungkapkan bahwa konservatisme dilakukan karena: 1) kecenderungan untuk bersikap pesimis dianggap perlu untuk mengimbangi optimisme yang mungkin berlebihan dari para manajer dan pemilik sehingga kecenderungan untuk melebih-lebihkan dalam pelaporan relatif dapat dikurangi; 2) laba dan penilaian (*valuation*) yang dinyatakan terlalu tinggi (*overstatement*) lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya daripada

penyajian yang bersifat kerendahan (*understatement*) dikarenakan risiko untuk menghadapi tuntutan hukum karena dianggap melaporkan hal yang tidak benar menjadi lebih besar; 3) akuntan kenyataannya lebih mampu memperoleh informasi yang lebih banyak dibandingkan mampu mengkomunikasikan informasi tersebut selengkap mungkin kepada para investor dan kreditor, sehingga akuntan menghadapi dua (2) macam risiko yaitu risiko bahwa apa yang dilaporkan ternyata tidak benar dan risiko bahwa apa yang tidak dilaporkan ternyata benar.

Ketiga faktor yang telah dipaparkan, diduga dapat mempengaruhi *accounting conservatism* dengan berlandaskan pada pendekatan teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986). Atas dasar pemahaman tersebut maka dibuatlah kerangka pemikiran penelitian yang menganalisis bagaimana hubungan antara *bonus plan*, *debt covenant*, dan *political cost* terhadap *accounting conservatism* disajikan dalam gambar 2.1



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan :

———— : Secara Parsial

----- : Secara Simultan

### **2.3 Hipotesis**

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Bonus Plan* secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Accounting Conservatism* pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di Indeks NIKKEI 225 *Japan Exchange Group* dan Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018.
2. *Debt Covenant* secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Accounting Conservatism* pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di Indeks NIKKEI 225 *Japan Exchange Group* dan Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018.
3. *Political Cost* secara parsial berpengaruh positif terhadap *Accounting Conservatism* pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di Indeks NIKKEI 225 *Japan Exchange Group* dan Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018.
4. *Bonus Plan*, *Debt Covenant*, dan *Political Cost* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Accounting Conservatism* pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di Indeks NIKKEI 225 *Japan Exchange Group* dan Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018.